



**Gunung**  
 Gunung  
 Kemana tinggi mu kini?  
 Terlihat rata dan membumi  
 Tak punyai pohon kokoh dan berani  
 Tunggul kayu jadi saksi mati  
 Engkau telah tiada ditangan  
 sengkuni

**Gunung**  
 Gunung  
 Kemana hutanmu kini?  
 Yang dulu perkasa tak tertandingi  
 Kini menjadi gersang tak  
 berpenghuni  
 Tersingkir mati dari tajamnya mata  
 gergaji

**Gunung**  
 Gunung  
 Kemana sungaimu yang mengalir  
 jernih?  
 Yang dulu menghidupi setiap benih  
 Menjadi sumber hidup setiap ruh  
 Kini menjadi kotor dan keruh

**Gunung**  
 Gunung  
 Secepat itukah perkasa mu jadi  
 artefak?  
 Secepat itukah kuasamu  
 tercampak?  
 Sehingga tunggul kayu yang kini  
 Nampak  
 Hingga pesonamu terdepak  
 Oleh alat berat yang membatat  
 dalam rekam jejak

**Mahendra**



YAYASAN PALUNG  
 GUNUNG PALUNG ORANGUTAN CONSERVATION PROGRAM  
 Media Informasi Pencinta Satwa **MIaS**  
 Edisi Kedua 2024

# PERHUTANAN SOSIAL

Target Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dan Peran Lembaga Pendamping

Capaian Yayasan Palung Dalam Program Perhutanan Sosial

Peran Pemerintah Desa Rantau Panjang Dalam Perhutanan Sosial

**YAYASAN PALUNG**  
 (Gunung Palung Orangutan Conservation Program)  
 e-mail : [yayasanpalung01@gmail.com](mailto:yayasanpalung01@gmail.com)  
 e-mail : [savegorangutans@gmail.com](mailto:savegorangutans@gmail.com)

**SALAM REDAKSI**

Perhutanan sosial adalah harapan baru bagi pengelolaan sumber daya hutan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Program ini membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan semangat kebersamaan, perhutanan sosial menghadirkan solusi nyata untuk mengatasi konflik tenurial, memperkuat ekonomi desa, dan melestarikan ekosistem kita.

Dalam MlaS Edisi Kedua Tahun 2024, kami mengulas tentang Proyek Penelitian Orangutan di Sungai Rangkong, Target Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dan Peran Lembaga Pendamping, Capaian Yayasan Palung Dalam Program Perhutanan Sosial, RK-TAJAM Melakukan Aksi Penanaman 100 Pohon Dalam Rangka Memperingati Hari Ozon Internasional 2024, Keanekaragaman Flora di Hutan Desa, Pengusulan Hutan Desa, Hutan Desa Gudang Biodiversitas dan Rumah Terakhir Bagi Satwa Liar, Peningkatan Kapasitas Berbasis Konservasi di Komunitas Pariwisata Pembangunan Pedesaan Bersama Project Konservasi Penyu Sri Lanka, Patroli Gabungan Hutan Desa Pemangkat dan Nipah Kuning, Peran Pemerintah Desa Rantau Panjang dalam Perhutanan dan Strategi Pemasaran Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Kami juga menggali tantangan yang masih dihadapi, serta berbagi wawasan dan ide untuk memaksimalkan manfaat program ini.

Semoga sajian ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bersama-sama, kita wujudkan hutan untuk rakyat, rakyat untuk hutan!

**REDAKSI**

**Penerbit** : Yayasan Palung

**Pembina**: Direktur Eksekutif GPOCP  
Dr. Cheryl Knott

**Penanggung Jawab** : Edi Rahman

**Pimpinan Redaksi** : Widiya

**Editor** : Riduwan

**Layout** : Erik Sulidra

**REPORTER**

Wahyu Susanto, Edi Rahman, Widiya Octa Selfiany, Desi Kurniawati, Hendri Gunawan, Simon Tampubolon, Sy. Abdul Samad, Suyandi, Risya Rejita, Rudi Hartono, Mahendra, Salmah, Asbandi, Syainullah, Ranti Naruri, Petrus Kanisius, Erik Sulidra, Riduwan, Robi Kasianus, Ahmad Rizal, Ishma Fatiha Karimah, Sukri, Ratiah, Sela Darmiyati, Susanto, Samsidar, Ayu Zaleha, Adittia Saputra, Gunawan Wibisono, Iis Kurniawati, Sabta Pelari, Ari Marlina.

**Daftar Isi**

Headline	: Target Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dan Peran Lembaga Pendamping.....	3
Reportase	: Capaian Yayasan Palung Dalam Program Perhutanan Sosial.....	4
Reportase	: Pengusulan Hutan Desa.....	5
Gaug	: Hutan Desa Gudang Biodiversitas dan Rumah Terakhir Bagi Satwa Liar.....	6
Gaug	: Patroli Gabungan Hutan Desa Pemangkat dan Nipah Kuning.....	6
Gaug	: Stragegi Pemasaran Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).....	9
Tokoh	: Peran Pemerintah Desa Rantau Panjang Dalam Perhutanan Sosial.....	10
Info	: Peningkatan Kapasitas Berbasis Konservasi di Komunitas Pariwisata dan Pembangunan Pedesaan Bersama Project Konservasi Penyu Sri Lanka.....	11
Info	: Keanekaragaman Flora di Hutan Desa.....	12
Info	: RK-Tajam Melakukan Aksi Penanaman 100 Pohon Dalam Rangka Memperingati Hari Ozon Internasional 2024 .....	13
Info	: Proyek Penelitian Orangutna di Sungai Rangkong.....	14
Kuis	: Kuis Berhadiah.....	15



**Syarat dan Ketentuan Kuis:**

1. Peserta berdomisili di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
2. Wajib mengikuti akun Instagram @yayasan\_palung
3. Jawaban kuis dikirim ke email [eec.bentangor@gmail.com](mailto:eec.bentangor@gmail.com) dengan subjek email: Kuis Mias YP - Nama Peserta Kuis - Domisili - Nomor WA, (Kuis Mias YP - Jessica - Kabupaten Kayong Utara - 0853xxxxxxx)
4. Kuis berlaku hingga Juni 2025
5. Sepuluh orang pemenang dengan jawaban paling baik akan mendapatkan paket hadiah menarik dari Yayasan Palung
6. Pemenang kuis akan dihubungi melalui WA
7. Tidak berlaku untuk staf Yayasan Palung

**Pertanyaan Kuis:**

1. Di daerah (Desa) mana saja Yayasan Palung melakukan pendampingan Hutan Desa?
2. Apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Palung dalam rangkaian pendampingan Hutan Desa?
3. Apa dampak positif keberadaan Hutan Desa terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat di sekitar hutan?



**SALAM LESTARI**

**YAYASAN PALUNG**

(Gunung Palung Orangutan Conservation Program)

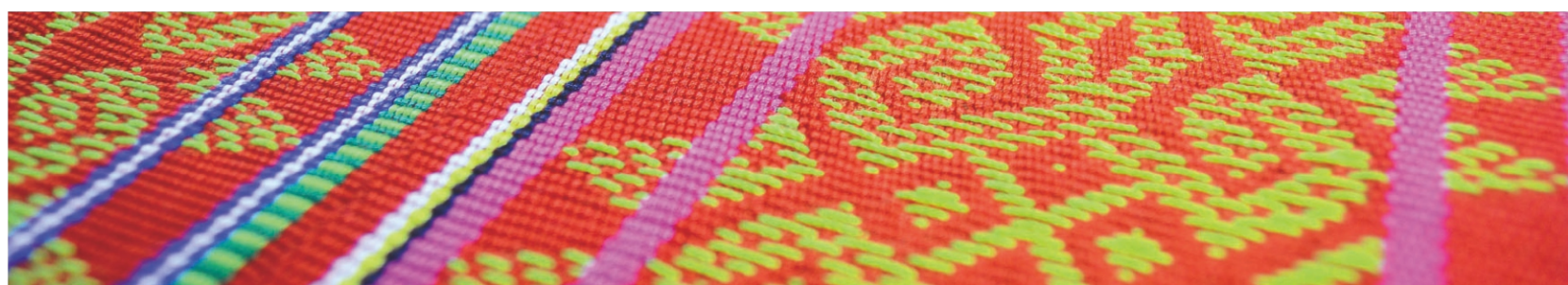
MlaS menjadi sarana bagi Yayasan Palung untuk berbagi informasi

Jl. Kolonel Sugiono no : 28  
Kec.Delta Pawan, Kab.Ketapang

Telp/Fax : (0534) 3030450

e-mail : [yayasanpalung01@gmail.com](mailto:yayasanpalung01@gmail.com)  
e-mail : [savegporangutans@gmail.com](mailto:savegporangutans@gmail.com)

-  Yayasan Palung
-  Gunung Palung Orangutan Project
-  [yayasan\\_palung](https://www.instagram.com/yayasan_palung)
-  <https://yayasanpalung.com>
-  GP Orangutans



## PROYEK PENELITIAN ORANGUTAN DI SUNGAI RANGKONG

Pada 1937 kawasan Gunung Palung mulai dilindungi dan dijadikan hutan cagar alam dengan luas 300 Km<sup>2</sup>, dan pada 1981 perluasan meningkat mejadi 900 Km<sup>2</sup> kemudian status kawasannya berubah menjadi suaka margasatwa. Pada akhirnya di 1990 menjadi Taman Nasional dengan luas 90.000 Ha. Tahun 1994 proyek orangutan mulai dibuka untuk kegiatan penelitian hingga sekarang, yang diberi nama Stasiun Riset Cabang Panti.

Pada tahun 2001 aktivitas *logging* terjadi besar-besaran di kawasan taman nasional, salah satunya adalah Sungai Rangkong. Sungai Rangkong sendiri merupakan salah satu akses jalan menuju lokasi penelitian Cabang Panti. Akibat adanya *logging* tersebut pada 2002 proyek orangutan dihentikan. Kemudian pada 2008 proyek orangutan kembali aktif hingga sekarang, selain itu ada juga proyek lain yaitu proyek Kelasi dan Kelempau (KKL) yang dimulai pada 2007-2020 di Cabang Panti.

Tahun 2019 proyek orangutan yang sebelumnya hanya melakukan penelitian di Cabang Panti, tersebut melebarkan sayapnya untuk melakukan penelitian di Sungai Rangkong. Para asisten melakukan pembuatan transek survei sarang orangutan yang terdiri dari 8 transek. Selain melakukan survei sarang, kegiatan lainnya adalah melakukan *phenology* pakan orangutan, pemasangan *camera trap* dan pengamatan satwa orangutan.

Pada 2022 penelitian di Sungai Rangkong mengalami perkembangan dengan baik, yaitu penelitian dilakukan secara intensif dan juga sudah melakukan pembangunan *camp* permanen. Selain itu juga pada awal 2023 jalur penelitian yang awalnya hanya 8 transek bertambah menjadi 51 transek dengan luas sekitar 500 hektar.

Pada 2024 proyek orangutan melakukan perekrutan 2 orang asisten yang akan ditempatkan di Sungai Rangkong. Saat ini fasilitas *camp* sudah dilengkapi dengan genset untuk penerangan malam hari, serta jaringan internet. Dengan adanya *camp* di Sungai Rangkong sangat membantu sekali, baik untuk Balai Taman Nasional ketika berpatroli melakukan pengamanan kawasan lindung, maupun membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional, terutama masyarakat Dusun Tanjung Gunung. Setiap bulan minimal 2 kali masyarakat dipekerjakan untuk mengantar persediaan makanan dan logistik lainnya melalui jalur darat yang sistemnya sudah diatur oleh seorang koordinator, hal inilah yang membantu perekonomian masyarakat.

Sangat diharapkan bahwa penelitian di Sungai Rangkong kedepannya bisa sebesar Stasiun Riset Cabang Panti dan dapat mendatangkan peneliti dari dalam dan luar negeri. Kawasan Sungai Rangkong ini menjadi salah satu percontohan tempat penelitian untuk hutan skunder.

Berkaca kepada sedikitnya lokasi yang bagus dan representatif untuk melakukan penelitian di alam, marilah kita bersama-sama mencintai bumi tempat kita bertapak dan berpijak hari ini, dan menjaga yang masih tersisa.

Kita sekarang masih ada di bumi ini, karena masih ada segelintir orang yang berjuang dan mencintai bumi, dan jika kita belum bisa mencintai bumi ini, janganlah membeci atau menyakitinya karena dia juga hidup dan membutuhkan cinta. Kita harus tanamkan didalam hati bahwa satu kebaikan yang kita perbuat hari ini, akan menjadi sesuatu yang besar kelak di kemudian hari.

Sabta – Yayasan Palung



(Kiri) Staf YP Berfoto Bersama Cheryl di Depan Camp Sungai Rangkong  
(Kanan) Bangunan Camp di Sungai Rangkong (dok. Yayasan Palung)

## Target Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dan Peran Lembaga Pendamping

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (PermenLHK No.83/2016)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan, saat ini pemerintah telah mengadakan Program Perhutanan Sosial. Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih mensejahterakan masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

Adanya program perhutanan sosial dilatar belakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif, untuk mencapai dua target tersebut, pemerintah melalui KLHK membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan pembangunan pemerintah tidak hanya tertuju pada kawasan perkotaan, melainkan juga mengarah kemasyarakat yang tinggal di pinggiran atau sekitar hutan.

Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi jadi, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang dipercaya oleh negara dengan pendampingan yang baik dari pemerintah daerah kemudian akan membentuk kelembagaan yang kuat, maka akan ada hak dan kewajiban, contohnya kita berikan alat pemadam kebakaran kalo sudah dipercaya untuk mengelola hutan tersebut, pastinya akan mememanfaatkannya dengan memadamkan dengan sendirinya. Apalagi, jika kita dampingi dengan multiusaha yang dikerjasamakan dengan hari ini nilai ekonomi dan wilayah juga akan meningkat, peran pendamping dalam Perhutanan sosial sangatlah penting karena LPHD ,harus kita dampingi dengan melalui program yang sudah di buat sebelumnya.

Adapun keterlibatan pendamping dan pegiat perhutanan sosial menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberian akses tersebut. Guna menjaga keberadaan aset perhutanan sosial itu, perlu juga pendampingan pembiayaan atau fasilitas dana bergulir pendampingan untuk meningkatkan kelas kelompok perhutanan sosial juga diperlukan mengingat pengelolaan dana bergulir tersebut memiliki instrumen yang spesifik dan intensif upaya pendampingan ini melibatkan sejumlah pihak tertentu Melalui kolaborasi atau kerjasama LPHD dengan dunia usaha dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan secara bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat.

Melalui kerja sama Perhutanan Sosial, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, karena mereka dapat merasakan dampak langsung dari kebijakan dan tindakan yang mereka ambil Kewenangan LPHD untuk melakukan kerjasama multipihak, disebut jelas dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 113, menyebutkan bahwa selain dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan, LPHD sudah ditempatkan sebagai pelaku utama atau subjek, dan penerima manfaat dalam pengelolaan hutan yang lestari untuk sebesar-besarnya peningkatan ekonomi masyarakat yang merata. Kelembagaan yang



Kegiatan Penanaman Bibit Pada Area Bekas Terbakar. (Dok. Yayasan Palung)

kuat dan sumber daya manusia yang cakap dengan perencanaan yang terukur menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan Perhutanan Sosial.

Karenanya LPHD harus memiliki rencana kelola Perhutanan Sosial atau RKPS, melalui berbagai rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sehingga melahirkan Sumber Daya Manusia yang cakap menjadi bagian yang rutin dari kegiatan LPHD dalam pengelolaan kelembagaan. Dukungan pemerintah dalam mensukseskan program Perhutanan Sosial menjadi bagian dari visi pembangunan perhutanan di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Perhutanan Sosial oleh tim Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Kalimantan Barat menjadi percontohan provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Desa. Provinsi ini bahkan mengantongi jumlah izin terbanyak untuk Hutan Desa. Hingga Oktober 2020, terdapat 116 izin Hutan Desa dengan total luasan 334 ribu hektare. Menurut temuan KIC, Kalimantan Barat juga menjadi provinsi dengan nilai indeks tertinggi senilai 81,9. Adapun angka median nasional senilai 36. Provinsi ini meraih posisi tertinggi karena memiliki jumlah kelompok usaha terbanyak khusus skema Hutan Desa sebanyak 235 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Terdapat 105 potensi komoditas yang merupakan kedua terbesar di kategorinya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupaya kuat untuk mempertahankan keberhasilan ini adapun dukungan regulasi dari Gubernur diharapkan mempermudah pelaksanaannya di lapangan.

Sukrianto - Yayasan Palung

Reportase

CAPAIAN YAYASAN PALUNG DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan sosial merupakan konsep pengelolaan hutan yang melibatkan langsung masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat sumberdaya hutan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat disekitar kawasan hutan sekaligus tetap menjaga kelestarian secara berkelanjutan. Konsep perhutanan sosial ini dibagi menjadi lima sekema yaitu hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan.

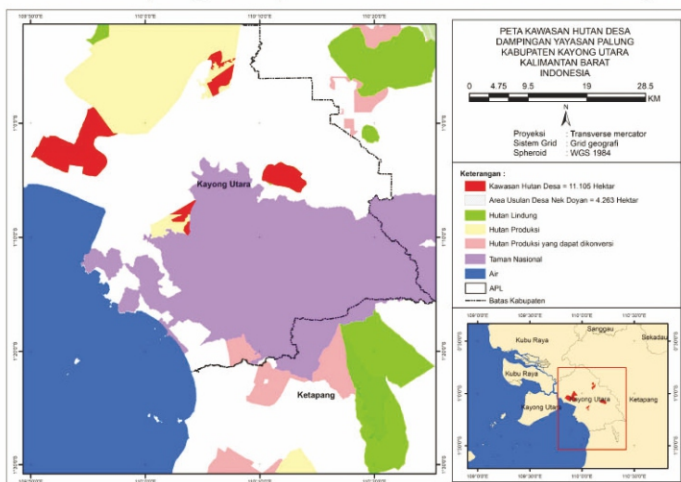
Yayasan Palung sebagai lembaga konservasi orangutan dan habitatnya telah berperan aktif dalam mendukung program perhutanan sosial melalui skema hutan desa, sejak tahun 2013 menginisiasi dan memulai program perhutanan sosial di wilayah

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Pada tahun 2015 Yayasan Palung memfasilitasi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung gambut Sungai Paduan yaitu di Desa Padu Bajar, Pulau Kumbang, Pemangkat dan Nipah Kuning dalam pengurusan Hak Kelola Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Desa. Kemudian Pada kawasan hutan produksi Sungai Purang juga diajukan Hak Kelola Perhutanan sosial melalui skema hutan desa untuk Desa Penjalaan.

Setelah ± 2 tahun tepatnya pada 2017 usulan Hutan Desa yang didampingi oleh Yayasan Palung disetujui oleh Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 5 Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diterbitkan yaitu HPHD Banjar Lestari di Desa Padu Banjar dengan luas ± 2.883 ha, HPHD Koembang Betedoeh di Desa Pulau Kumbang dengan luas ± 609 ha, HPHD Alam Hijau di Desa Pemangkat dengan luas ± 1.245 ha, HPHD Hutan Bersama di Desa Nipah Kuning dengan luas ± 2.051 ha dan HPHD Simpang Keramat di Desa Penjalaan dengan luas ± 376 ha.

Pada tahun 2017 Yayasan Palung juga memfasilitasi Masyarakat Desa Rantau Panjang dan Desa Batu Barat kec. Simpang Hilir dalam pengurusan Hutan desa. kemudian pada tahun 2019 SK HPHD kedua desa tersebut dikeluarkan oleh KLHK dengan luas ± 344 Ha. untuk HPHD Muara Palung Desa Rantau Panjang dan luas ± 454 Ha. untuk HPHD Batu Barat

Bersambung ke halaman 7



Peta Lokasi Hutan Desa. (Dok. Yayasan Palung)

RK – TAJAM MELAKUKAN AKSI PENANAMAN 100 POHON DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI OZON INTERNASIONAL 2024



Foto Bersama Kegiatan Hari Ozon. (Dok. Yayasan Palung)

Hari Ozon Internasional (*International Day for the Preservation of the Ozone Layer*) diperingati setiap tahun pada tanggal 16 September, namun kegiatan tersebut baru diselenggarakan pada tanggal 29 september 2024. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang menjaga lapisan Ozon dan mendorong upaya pelestariannya sebagai pelindung bumi.

Apa yang dimaksud dengan Lapisan Ozon? Lapisan Ozon merupakan wilayah Stratosfer bumi yang menyerap sebagian besar radiasi Ultraviolet Matahari, yaitu berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari bahaya yang ditimbulkan dari radiasi Ultraviolet Matahari. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk menjaga dan melindungi lapisan Ozon demi melestarikan planet tercinta.

Pada kesempatan tersebut, RK-Tajam bersama beberapa perwakilan sekolah yang ada di Ketapang, seperti ; SMKN 01 Ketapang, SMKN 02 Ketapang, SMKN 03 Ketapang, SMAN 02 Ketapang, SMAN 03 Ketapang, SMA Antiokhia, SMA PL St Yohanes dan SMA Muhammadiyah Ketapang. Selain itu kegiatan tersebut diikuti oleh MBKM Magang di Yayasan Palung yang mana merupakan Mahasiswa/i penerima Beasiswa *West Bornean Orangutan Caring Scholarship (WBOCS)*. Sebanyak 100 bibit yang ditanam di lokasi Jl. Karya Tani yang terdiri dari tanaman Ketapang Kencana dan Matoa. Bibit-bibit yang ditanam merupakan bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang (Perkim LH Kab. Ketapang). Adapun jumlah yang ikut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon tersebut yaitu kurang lebih 75 orang.

Kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga lapisan Ozon dengan beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti menyetel suhu AC ke 24 derajat celsius, melakukan perawatan AC secara berkala, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan,

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi hal kecil yang bisa kita lakukan. Dengan melakukan kegiatan ini, harapannya bisa meningkatkan kesadaran para kelompok muda sehingga bisa peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar, semoga tanaman yang sudah ditanam bisa tumbuh dengan baik dan menjadi tanaman yang berguna bagi kehidupan, karena sekecil apapun tindakan yang kita lakukan untuk bumi akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup di bumi kita tercinta.

Sela Darmiyati – Yayasan Palung



Penanaman Pohon. (Dok Sela - Yayasan Palung)

## KEANEKARAGAMAN FLORA DI HUTAN DESA

Sebagai upaya dan komitmen bersama dalam konservasi orangutan dan habitatnya Yayasan Palung juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan perhutanan sosial diantaranya melalui skema hutan desa. Klasifikasi tipe ekosistem hutan desa binaan Yayasan Palung diantaranya adalah hutan rawa gambut, *lowland* dan *low mountain*.

Ekosistem hutan rawa gambut meliputi kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Paduan; HD Padu Bajar, HD Pulau Kumbang, HD Pemangkat, HD Nipah Kuning dan Hutan Produksi (HP) Sungai Purang; HD Penjalaaan dan HD Rantau Panjang. Ekologi seluruh kawasan hutan tersebut merupakan lahan basah (*wet land*) dengan karakteristik vegetasi terendam dalam waktu singkat berkala atau permanen. Secara umum rawa gambut di Hutan Desa memiliki karakteristik vegetasi lebih banyak ditemui pohon-pohon berdiameter kecil (10-19,9 cm), diikuti pohon berukuran sedang (20-39,9 cm) dan paling sedikit pohon berukuran besar (lebih dari 40 cm). Setidaknya beberapa hal yang telah diketahui yaitu jajaran pohon menyediakan fungsi bagi orangutan untuk membuat sarang. Selain itu tumbuhan penghasil buah merupakan sumber makanan utama bagi orangutan di Hutan Desa.

Selain orangutan berbagai satwa seperti babi hutan, hewan pengerat (bajing), ruminansia (rusa) dan avifauna (burung) di lokasi tersebut memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai sumber energi dan tempat tinggal. Hutan rawa gambut memiliki karakteristik yang khas yaitu banyaknya tumpukan serasah dan dalam keadaan terendam, secara tidak langsung berperan dalam *water flows* dalam suatu mekanisme kompleks *water inlet* dan *water outlet* sehingga dalam konteks yang lebih umum kita mengenalnya sebagai fungsi resapan. Selain itu banyak ditemukan karakteristik struktur akar tegakan dengan akar jangkar, banir jangkar dan akar lutut di ekosistem rawa gambut tersebut. Struktur tersebut menahan berbagai serasah di lantai hutan, menyediakan bahan regenerasi gambut dalam bentuk serasah, sehingga bersamaan dengan keberadaan keanekaragaman flora yang tinggi dan terjaga dapat meningkatkan ketahanan sistem air terhadap perubahan iklim. Hal tersebut menjadi contoh satu diantara fungsi Hutan Lindung sebagai penyangga.

Suku atau keluarga (*family, familia*) tumbuhan terbanyak merupakan tumbuhan berbunga (*Angiospermae*) yang memiliki struktur kompleks bakal

buah (*ovarium*). Tumbuhan rawa gambut di Hutan Desa berdasarkan kedudukan tumbuhan pada siklus rantai makanan, maupun jaring-jaring makanan, merupakan produsen dan sumber energi bagi organisme di sekitarnya. Setidaknya terdapat 153 jenis (45 famili), 2088 individu pohon berdasarkan kegiatan survei bersama plot permanen pada tahun (2023) di Hutan Desa HLG Sungai Paduan dan Hutan Desa HP Sungai Purang. pohon yang diketahui mendominasi HLG Sungai Paduan yaitu *Litsea gracilipes* (*medang*), sedangkan jenis pohon yang berbeda mendominasi HP Sungai Purang yaitu *Litsea resinosa* (*medang*). Jumlah total tersebut memiliki nilai kerapatan total 328,33 batang/ ha di HLG Sungai Paduan dan 425 batang/ ha dengan tumbuhan yang telah diketahui sebagai genus pakan orangutan 268,9 batang/ ha (HLG Sungai Paduan) dan 318,12 (HP Sungai Purang).

Tipe ekosistem Rawa gambut Hutan Desa juga dapat ditemukan berbagai jenis tumbuhan yang sering disebut secara lokal sebagai akar (*liana*), dimana istilah akar tersebut merujuk pada arah tumbuh tumbuhan yang tidak seperti pohon yang tegak (*erectus*), melainkan cenderung tidak beraturan. Beberapa diantara liana tersebut yaitu *melinjo hutan* (*Gnetum* spp.), *gitak atau jantak* (*Willughbeia* spp.), *akar kuning* (*Fibraurea* sp.), dan *bajakah, kait-kait* (*Uncaria* sp.). Terdapat juga kelompok, ara, tin, (*Ficus* spp.) berperan dalam siklus hidup banyak serangga (insecta), menyediakan sumber energi bagi primata (misalnya; orangutan, gibbon, kelasi, monyet, bekantan) dan avifauna (misalnya *Rangkong gading; Rhinoplax vigil*).

Gunawan Wibisono - Yayasan Palung



Bunga dan Buah di lantai Hutan Desa, Buah; *Baccaurea* (kiri atas) *Tetramerista* (kanan atas); *Blumeodendron* (kiri bawah), Bunga; *Stemonurus* (kanan bawah),  
Source; (photograph by; G. Wibisono, source; YP).

## PENGUSULAN HUTAN DESA

Yayasan Palung atau *Gunung Palung Orangutan Conservation Program* (GPOCP) memiliki 2 (dua) program utama yakni riset dan konservasi. pada program riset fokus area kerjanya adalah di kawasan Taman Nasional Gunung Palung sedangkan pada program konservasi area kerja berada di luar kawasan inti Taman Nasional Gunung Palung yang terletak didua kabupaten yaitu Kab. Kayong Utara dan Kab. Ketapang. Pada program konservasi terbagi lagi menjadi beberapa program diantaranya Program Pendidikan Lingkungan (PL), Program Perlindungan dan Penyelamatan Satwa (PPS), Program *Sustainable Livelihood* (SL), dan Program Hutan Desa (HD). Empat program Yayasan Palung tersebut memiliki keterkaitan yang erat, artinya setiap program selalu saling melengkapi dan memiliki peran masing-masing dalam upaya konservasi orangutan dan habitatnya.



Menerima SK Pengelolaan HD Lubuk Batu. (Dok. Yayasan Palung)

Penulisan kali ini akan fokus pada salah satu program yang ada di Yayasan Palung yaitu pada Program Hutan Desa. Pengertian Hutan Desa sendiri merupakan sebuah kawasan hutan (Hutan Negara) baik itu hutan dengan fungsi Lindung maupun Produksi yang belum dibebani izin. Hutan Desa ini dikelola oleh Lembaga Desa yang telah mendapatkan Persetujuan pengelolaan Hutan Desa dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada beberapa manfaat dengan adanya Hutan Desa yang diantaranya sebagai penyerap karbon, sumber oksigen, habitat satwa, hingga penjaga tata air, sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti buah-buahan, tumbuhan obat, resin, dan lain-lain. Intinya Hutan Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri.

Sejauh ini, Yayasan Palung sudah mendampingi 9 (Sembilan) Hutan Desa yang telah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Desa yang terdiri dari Desa Rantau Panjang, Penjalaaan, Nipah Kuning, Pemangkat, Pulau Kumbang, Padu Banjar, Batu Barat, Lubuk Batu, dan Matan Jaya. Semua Hutan Desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Hutan Desa dengan luas total sekitar 11.103 hektar ini dikelola oleh 9 Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) dengan total anggota 197 orang.

Proses pengusulan pembentukan Hutan Desa dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi ini dilakukan di Desa yang akan mengusulkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Pihak yang perlu dilibatkan diantaranya Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, dan warga sekitar. Tujuan diskusi adalah untuk membahas dan memutuskan apakah warga setuju atau tidak untuk mengusulkan skema Hutan Desa. Jika setuju, maka proses pengusulan dapat dilanjutkan.

2. Penyiapan berkas pengusulan

Berkas yang perlu disiapkan meliputi Peraturan Desa tentang Lembaga Desa, Surat Keputusan Desa tentang Organisasi Lembaga Desa, informasi gambaran umum fisik, sosial, dan ekonomi Desa, informasi potensi Kawasan Hutan yang akan menjadi Hutan Desa, dan Peta dengan skala 1:50.000.

3. Membentuk Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan kelompok masyarakat. Biasanya struktur lembaga ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi bidang. LDPH akan menjadi lembaga yang memiliki hak dalam hal pengelolaan Hutan Desa.

4. Penyerahan berkas

Berkas yang telah disiapkan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DirJen PSKL). Selain dalam bentuk digital, berkas dalam bentuk fisik juga perlu diserahkan.

5. Verifikasi dokumen

Apabila dokumen belum dianggap lengkap, maka LDPH akan diberi waktu untuk memenuhi dokumen yang kurang. Namun jika dokumen lengkap, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

## HUTAN DESA GUDANG BIODIVERSITAS DAN RUMAH TERAKHIR BAGI SATWA LIAR

Yayasan Palung (YP) mengadakan survei biodiversitas bersama KPH, dan LPHD di kawasan hutan desa dengan tujuan memperoleh informasi mengenai perkiraan populasi orangutan yang terdapat di dalam kawasan tersebut serta mengetahui potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar lainnya, khususnya dari taksa mamalia dan burung (*avifauna*). Untuk perkiraan populasi orangutan, pada tahun ini masih belum dapat dihitung karena belum semua data sarang orangutan pada jalur pengamatan terkumpul.

Rata-rata 75% jenis pohon yang ada merupakan pohon makanan orangutan, ini menandakan potensi tingkat kelayakan hidup di kawasan tersebut baik bagi orangutan. Setidaknya, ada dua jenis pohon langka yang ditemui, diantaranya Meranti Paya (*Shorea platycarpa*) berstatus *Endangered*, dan Ramin (*Gonystylus bancanus*) berstatus *Critically Endangered*.

Satwa liar lain yang teridentifikasi adalah Bekantan (*Nasalis larvatus*), Kelempiau (*Hylobates albibarbis*), Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Rusa Sambar (*Rusa unicolor*), Babi Hutan Berjanggut (*Sus barbatus*), Bajing Kerdil Telinga-hitam (*Nannosciurus melanotis*), Bajing kelapa (*Plantain Squirrel*), Tupai Prevost (*Callosciurus prevostii*), Jelarang (*Ratufa affinis*), dan Beruang Madu

(*Helarctos malayanus*) serta satwa dari keluarga kucing (*Felidae*). Satwa-satwa tersebut diidentifikasi baik dari perjumpaan langsung, jejak, bekas cakaran maupun suara.

Tercatat lebih dari 70 jenis burung di masing-masing lansekap hutan desa. Setidaknya ada lima suku burung yang penting dan menjadi salah satu indikator penilaian lingkungan, yaitu Rangkong (Bucerotidae), Pelatuk (Picidae), Luntur (Trogonidae), Burung Pemangsa (Accipitridae), dan Cucak-cucakan (Pycnonotidae). Dapat dikata, hutan desa adalah gudang biodiversitas. Lansekap hutan desa menjadi habitat penting bagi satwa liar dalam fungsinya sebagai rumah terakhir akibat degradasi hutan oleh bermacam sebab. Melindungi gudang biodiversitas ini bukan semata untuk melindungi kehidupan satwa liar, tapi lebih jauh adalah untuk melindungi kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan.

Erik Sulidra - Yayasan Palung



Anggota Tim Survei Biodiversitas Mengumpulkan Data Lapangan (Dok. Yayasan Palung).

## PATROLI GABUNGAN HUTAN DESA PEMANGKAT DAN NIPAH KUNING

Pada bulan Agustus dan September 2024, Yayasan Palung bersama pihak pemerintah mengadakan kegiatan patroli gabungan di Kawasan Hutan Desa Pemangkat dan Hutan Desa Nipah Kuning. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh laporan dari tim patroli Pemangkat dan Nipah Kuning yang telah melakukan pemantauan setiap bulan, yang mengindikasikan adanya beberapa pembalakan yang melakukan penebangan ilegal di dalam Kawasan Hutan Desa. Pada laporan data smart patrol, ditemukan beberapa titik lokasi penebangan, termasuk serkel (tempat pengolahan kayu) yang berada didalam Kawasan Hutan Desa. Sehingga dari temuan tersebut dilakukanlah patroli gabungan. Adapun patroli gabungan tersebut terdiri dari KASI PPM UPT KPH Wilayah Kayong, Polhut Tanagupa, Babinsa Koramil, Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir, Yayasan Palung dan juga anggota LPHD. Selama proses patroli berlangsung ada beberapa alat bukti yang ditemukan

seperti, kayu olahan yang siap dikeluarkan, alat bantu pengangkatan kayu, serta bekas serpihan kayu yang cukup banyak.

Selanjutnya, pihak pemerintah bersama Yayasan Palung dan LPHD Pemangkat menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil terduga pelaku pembalakan diresourse KPH wilayah kayong Desa Pemangkat untuk diberikan surat peringatan dan pernyataan. Pelaku memenuhi panggilan dari tim gabungan untuk datang ke resource, setelah dialog panjang dengan



Temuan Patroli Bersama pemangkat. (Dok. Yayasan Palung)

Bersambung ke halaman 8

## Peningkatan Kapasitas Berbasis Konservasi di Komunitas Pariwisata dan Pembangunan Pedesaan Bersama Project Konservasi Penyu Sri Lanka

Project Konservasi Penyu di Sri Lanka yang dikenal dengan *Turtle Conservation Project* (TCP) merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup yang mandiri, yang saat ini dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari lima pejabat yang dipelopori oleh Thusan Kapurusinghe seorang spesialis penyu laut. Sejak 1993, TCP berupaya untuk melestarikan penyu laut yang terancam punah melalui program-program yang meliputi penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran, dan mata pencaharian bagi masyarakat untuk melindungi lingkungan pesisir. Pada tanggal 22-29 September 2024, Yayasan Palung (YP) berkesempatan mengirim 6 staf ke TCP guna peningkatan kapasitas.

Sesampainya Colombo, Sri Lanka, tim langsung disambut oleh TCP yang diwakili oleh Thusan dan Pubuduinee. Agenda hari pertama adalah mengunjungi daerah Eluwankulama, Puttlam. Di sini, tim melihat keindahan danau yang awalnya direncanakan sebagai irigasi persawahan masyarakat, namun seiring waktu danau tersebut menjadi habitat bermacam satwa liar seperti merak, berbagai burung air, buaya, pun termasuk satwa endemik seperti *purple faced leaf monkey*. Agenda hari kedua, tim berkunjung ke pusat rehabilitasi mangrove di Laguna Puttlam yang luasannya sekitar 3000 Ha. Tujuan rehabilitasi ini untuk meningkatkan luas hutan bakau dan menjaga keanekaragaman hayati lokal guna menyediakan jasa hutan bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Setelahnya tim melanjutkan perjalanan ke Rekawa untuk melakukan observasi penyu di pantai saat malam hari.

Presentasi program TCP mengenai keberhasilan mereka membangun konservasi berbasis masyarakat, kami dapatkan pada hari ke-3. Setelahnya tim diajak melihat biodiversitas laut, dan mengunjungi komunitas dampingan mereka. Salah satu yang menarik adalah tim bertemu dengan *Rekawa Kids* dan bernyanyi bersama dengan membawakan lagu Si Pongo. Meskipun anak-anak tersebut terbatas dengan bahasa namun tidak membuat surut mereka belajar bernyanyi Si Pongo, kegiatan ditutup dengan melakukan bersih-bersih pantai Rekawa dari sampah plastik. Agenda kunjungan didua hari berikutnya adalah berkunjung ke Taman Nasional Yala dan Taman Nasional Horton Plain. Tim sempat melihat macan tutul dan gajah secara langsung ketika berada di Yala, sedangkan di Horton Plain tim disuguhkan pemandangan pegunungan yang sangat

indah serta melihat beberapa tumbuhan endemik, burung, air terjun dan jurang yang sangat terjal dengan julukan "World End". Di sela-sela perjalanan panjang menuju lokasi, tim singgah ke kedai-kedai teh di pinggir jalan untuk menikmati teh lokal daerah tersebut.

Malam terakhir kunjungan tim ditutup dengan makan malam bersama TCP, YP dan duta besar Indonesia untuk Sri Lanka, ibu Dewi Gustina Tobing. Tim YP berkesempatan sedikit bertukar pikiran mengenai perkembangan arah konservasi di Indonesia, dan bagaimana pengalaman selama kunjungan tim YP ini secara realistis bisa diadopsi untuk beberapa model konservasi di Indonesia. Makan malam bersama diakhiri dengan penyerahan sertifikat oleh TCP dan cinderamata oleh YP (GPOCP).

Ranti Naruri – Yayasan Palung



Kunjungan ke Rekawa. (Dok. Yayasan Palung)



Kunjungan ke Taman Nasional Horton Plains. (Dok. Yayasan Palung)

## PERAN PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan sosial merupakan suatu konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya hutan. Tujuan utama dari perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam perhutanan sosial, masyarakat diberdayakan untuk memiliki hak akses dan kontrol terhadap hutan, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, perhutanan sosial di pemerintahan desa muncul sebagai solusi yang memberdayakan masyarakat sekaligus melestarikan alam. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu desa yang memainkan peran krusial dalam pengembangan perhutanan sosial, khususnya melalui pengelolaan Hutan Desa. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, pemerintah desa melibatkan penduduk setempat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dengan nama Muara Palung.

Hasanan selaku Kepala Desa Rantau Panjang dan sekaligus Ketua LPHD Muara Palung mengatakan "Pemerintah Desa Rantau Panjang terus membangun komunikasi dan kolaborasi kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kayong sebagai Lembaga pemerintah yang berwenang serta menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Palung (YP) untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan". Kerjasama ini tentunya sangat penting karena YP memiliki pengalaman dan keahlian dalam membina masyarakat melalui kelompok KUPS dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program-program yang dikembangkan dalam kolaborasi ini menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa,



Hasanan ( Ketua LPHD Desa Rantau Panjang )

sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan sambil tetap menjaga kelestarian hutan. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penanaman pohon, yang tidak hanya bermanfaat untuk rehabilitasi hutan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan sekitar masyarakat.

Pemerintah desa melaksanakan berbagai kegiatan bersama YP, seperti program pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui workshop dan diskusi kelompok, warga desa diajarkan cara-cara efisien untuk

memanfaatkan hasil hutan, termasuk pengolahan hasil hutan bukan kayu dan pertanian organik. Pendekatan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa memperkuat hubungan sosial di antara warga. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan sumber daya alam mereka. Rasa kepemilikan ini sangat penting karena mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan berkomitmen dalam menjaga kelestarian hutan.

Program Perhutanan Sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi, pemerintah desa menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam pengelolaan Hutan Desa di Rantau Panjang memberikan hasil yang baik. Hal ini merupakan contoh bagaimana perhutanan sosial dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat dan alam.

**Hasanan (Kepala Desa Rantau Pajang)**

Sambungan dari halaman 5

Jaya Desa Batu Barat. Selanjutnya Yayasan Palung mendampingi Desa Lubuk Batu dan Desa Matan Jaya untuk mengusulkan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada tahun 2021, SK HPHD kedua desa tersebut diterbitkan oleh KLHK pada tahun 2023 dengan luas ± 941 Ha. untuk LPHD Lubuk Batu Betuah dengan status Hutan Produksi tetap. Kemudian HPHD Matan Jaya di Kawasan Hutan Lindung dengan luas ± 2.200 Ha. Tidak hanya itu, Awal tahun 2024 hingga sekarang proses inisiasi dan pendampingan pengusulan program perhutanan sosial dengan skema hutan desa juga dilaksanakan di daerah Kabupaten Ketapang yaitu di Desa Laman Satong tepatnya di Dusun Nekdoyan dan Desa Pangkalan Teluk yaitu Dusun Pangkalan Jihing Dimana kedua desa tersebut berbatasan langsung dengan Hutan Lindung (HL) Gunung Tarak.

Program pendampingan dilakukan secara berkelanjutan oleh Yayasan Palung kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) binaan dengan total luas wilayah Hutan Desa yang telah memiliki izin adalah ± 11.105 Ha. yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa yang berada di Kabupaten Kayong Utara dan Lebih dari 6.000 Ha. yang sedang dalam proses pengusulan terletak di 2 desa di Kabupaten Ketapang. Melalui Program Hutan Desa, kegiatan pendampingan Yayasan Palung dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Pendampingan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Desa, Pendampingan dalam Pengelolaan Kelembagaan dalam hal ini Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Pendampingan dalam Pengelolaan Usaha Masyarakat sekitar Kawasan Hutan Desa.

Kegiatan rutin pendampingan Program Hutan Desa Yayasan Palung dalam pengelolaan kawasan hutan desa pasca izin adalah dengan memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap LPHD. Salah satu pendampingan yang terkait pengelolaan kawasan hutan desa diantaranya dengan mendampingi LPHD dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan Lestari, memfasilitasi LPHD dalam kegiatan penandaan batas areal kerja dan melaksanakan perlindungan serta pengamanan kawasan hutan desa dengan program SMART Patrol, memfasilitasi kegiatan restorasi dan reboisasi hutan di areal kerja LPHD, memberikan bantuan alat pemadam



Jalin Kerjasama Kemitraan Konservasi bersama Multipihak. (Dok. Yayasan Palung)

kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yayasan Palung juga memberikan dukungan penuh kepada LPHD untuk pendataan potensi kawasan hutan melalui kegiatan survey biodiversitas, pemasangan alat pantau pasif monitoring seperti perangkat kamera, alat ukur suhu, alat ukur curah hujan dan perekam suara yang dipasang didalam Kawasan hutan desa. LPHD juga berkewajiban menjaga areal kerjanya sesuai dengan Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, salah satu dukungan yang diberikan oleh Yayasan Palung adalah memfasilitasi kegiatan monitoring bersama / patrol bersama pencegahan kegiatan illegal didalam kawasan hutan desa.

Beberapa kegiatan pendampingan Yayasan Palung dalam aspek pengelolaan kelembagaan : mendukung pemerintah dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kayong untuk memfasilitasi penyusunan RKPS dan RKT LPHD, menjalin Kerjasama multi pihak baik swasta maupun pemerintah dalam mendorong program pengelolaan perhutanan sosial. melaksanakan kegiatan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan perhutanan sosial, sekolah lapang agroforestri, training pemadam kebakaran, seminar yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan desa, pelatihan keselamatan kerja dan mitigasi terkait konflik satwa liar serta kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan kelompok binaan.

Pendampingan berikutnya dilakukan Yayasan Palung dalam aspek pengelolaan usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan desa. Sampai saat ini Yayasan Palung telah membina setidaknya 11 (sebelas) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) aktif yang tersebar di Desa Padu Banjar, Pulau Kumbang, Pemangkat, Nipah Kuning, Penjataan dan Rantau Panjang, kemudian 4 KUPS yang baru dibentuk untuk wilayah Hutan Desa Matan Jaya dan Lubuk Batu. Untuk jenis usaha setiap KUPS bermacam-macam diantaranya adalah usaha tanaman hortikultura

Bersambung ke halaman 8

Sambungan dari halaman 7

seperti cabai, terong, timun, jagung, pengolahan kopi bubuk, keripik, kerupuk, hingga budidaya madu. Selain makanan, produk lain yang diproduksi oleh KUPS berupa anyaman pandan seperti tikar, tas, sajadah dan dompet.

Melalui program hutan desa diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan serta masyarakat mampu menjaga dan memanfaatkan hasil hutan dengan bijak sehingga hutan yang tersisa saat ini tetap lestari hingga anak cucu dan masyarakat yang hidup di sekitar hutan semakin sejahtera.

**Hendri Gunawan – Yayasan Palung**

Sambungan dari halaman 5

6. Verifikasi Teknis  
Kepala Balai Membentuk Tim Verifikasi Teknis (VerTek). Tim tersebut akan melakukan verifikasi di lokasi pengusulan HPHD. Selanjutnya tim akan melaporkan hasil VerTek kepada Kepala Balai PSKL.
7. Penerbitan HPHD  
Apabila hasil VerTek sudah dianggap lengkap dan layak, maka Dirjen PSKL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan Surat Keputusan HPHD.
8. Penyerahan Surat Keputusan (SK) HPHD  
SK HPHD yang diterbitkan biasanya diterima oleh Kepala Desa atau Ketua LDPH. SK HPHD dapat diserahkan oleh Gubernur, Menteri LHK, bahkan Presiden. HPHD memiliki masa berlaku selama 35 tahun dengan evaluasi 1 kali setiap 5 tahun.

Skema Hutan Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, sehingga LPDH harus melaksanakan kewajiban seperti Menyusun rencana kerja, memasang tanda batas, melaksanakan perlindungan hutan, hingga melakukan penanaman. Namun kegiatan tersebut tentunya tidak dapat mereka laksanakan sendiri tanpa berkolaborasi dengan mitra seperti UPT KPH Wilayah Kayong, Perusahaan, Yayasan Palung, dan Lembaga lainnya. Pendampingan merupakan satu diantara hak-hak yang harus diterima oleh LDPH. Contoh pendampingan yang diberikan Yayasan Palung yakni pelatihan, studi banding, sekolah lapang, bantuan perlengkapan perlindungan hutan, bantuan kebutuhan kelompok usaha, hingga monitoring LDPH dan kelompok usaha mereka. Melalui skema Hutan Desa, masyarakat memiliki akses secara legal untuk mengelola Kawasan Hutan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

**Robi Kasianus – Yayasan Palung**

Sambungan dari halaman 6

pertanyaan-pertanyaan, serta pendekatan persuasif, pelaku mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembalakan di Kawasan Hutan Desa Pemangkat. ia mengatakan bahwa tidak mengetahui pohon yang ia tebang masuk kedalam Kawasan hutan Desa, pelaku juga menjelaskan alasan melakukan penebangan pohon karena faktor ekonomi dan satu-satunya sumber mata pencahariannya. Tim kemudian menjelaskan bahwa Hutan Lindung tidak boleh ditebang, jika melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tim juga menjelaskan secara mendalam mengenai Hutan Lindung dan Hutan Desa, hasil dari penjelasan tersebut pelaku akhirnya menyetujui dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan pembalakan hutan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Desa.

Selanjutnya Yayasan Palung, LPHD Nipah Kuning bersama pihak Pemerintah beralih melakukan patroli bersama di Kawasan Hutan Desa Nipah Kuning pada bulan September, kegiatan patroli bersama Nipah Kuning tidak jauh berbeda dengan patroli bersama di Desa Pemangkat, tim juga sebelumnya menelusuri titik dan bukti penebangan pembalakan berupa serkel, serpihan kayu, olahan kayu didalam Kawasan Hutan Desa. Diketahui bahwa terduga pelaku pembalakan berjumlah 2 orang. Setelah mengetahui informasi tersebut tim kemudian memanggil dua terduga pelaku untuk hadir di Kantor Desa Nipah Kuning untuk dimintai keterangan. Dengan pendekatan yang sama, kedua pelaku kemudian memenuhi panggilan tim dan hadir di Kantor Desa Nipah Kuning. Tim menjelaskan dan berdialog kepada kedua pelaku mengenai Hutan Lindung dan Hutan Desa secara mendalam melalui Dinas LHK Prov.Kalbar, KASI PPM UPT KPH Wilayah Kayong, Polhut Tanagupa, Babinsa Koramil, dan Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir. Terduga pelaku menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui secara

## STRATEGI PEMASARAN PRODUK HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

Salah satu strategi pemasaran produk HHBK yaitu mengikuti event-event seperti pameran, penjualan online hasil produk dimedia sosial, dan juga pemasaran melalui *mobile market*.

*Mobile market* (biasanya dilakukan YP di pantai Pulau Datok) adalah salah satu program *Sustainable Livelihood* yang bertujuan untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk hasil hutan bukan kayu dan hasil pertanian organik yang dimiliki kelompok-kelompok Masyarakat dampingan yang ada di Desa Kecamatan Sukadana dan Desa Kecamatan Simpang Hilir.

Produk yang biasa dipasarkan dalam kegiatan *mobile market* sangat beragam. Untuk Desa yang ada di Kecamatan Sukadana yaitu Desa Pangkalan Buton dengan komoditasnya yang diproduksi dari hasil anyaman kerajinan bahan baku pandan bermotif dan juga hasil pangan seperti olahan rebung. di Desa Pampang Harapan komoditas yang diproduksi dari hasil anyaman bahan baku pakis resam, juga hasil pertanian hortikultura, dan budidaya ikan air tawar. di Desa Sejahtera komoditas yang diangkat dari hasil anyaman kerajinan dengan anyaman bahan baku pandan, lidi nipah (Lekar) yang bermotif, pertanian cabai, dan budidaya ikan air tawar. Sedangkan Desa Riam Berasap Jaya komoditas yang diproduksi yaitu hasil tanaman hortikultura. Kemudian untuk desa yang ada di Kecamatan Simpang Hilir yaitu Desa Rantau Panjang komoditas yang diproduksi adalah tanaman

hasil tanaman hortikultura, kemudian Desa Penjaluan komoditas yang diproduksi adalah hortikultura, hasil pangan keripik dari bahan baku singkong dan pisang, kopi, dan anyaman bahan baku pandan. Desa Nipah Kuning komoditas yang diproduksi yaitu anyaman bahan baku pandan. Desa Pemangkat komoditas yang diproduksi dari hasil olahan kerupuk dari bahan baku singkong. Desa Pulau Kumbang komoditas yang diproduksi dari hasil kerajinan dan olahan minyak makan dari bahan baku kelapa. Desa Padu Banjar komoditas yang diproduksi dari hasil pertanian hortikultura dan madu lebah.

**Mahendra – Yayasan Palung**



Mobile Market di Pantai Pulau Datok. (Dok. Abdul Samad)

Kegiatan *mobile market* mulai sejak 2023, yang ditangani langsung staf bidang program *Sustainable Livelihood*. Kegiatan ini rutin setiap bulan dilaksanakan dimulai dari jam 07.00 – 16.30 WIB, yang berlokasi di sekitar pantai Pulau Datok. Kegiatan ini sudah mendapat izin dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (DISPARPORA) dan Dinas Pertanian Kabupaten Kayong Utara.

Dengan adanya *mobile market* ini diharapkan dapat menjadi solusi masalah pemasaran pada kelompok dampingan. Selain itu YP juga membantu promosi lewat media online dan juga penjualan melalui Galeri Bentangor.

Dari hasil pemasaran yang dilakukan secara *mobile market* produk yang paling diminati oleh para pembeli adalah produk tanaman hortikultura, karena harganya yang relatif murah, juga merupakan produk bahan pokok yang memang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Diharapkan kegiatan *mobile market* ini rutin diadakan, sebagai salah satu solusi pemasaran yang memang sudah memberi hasil yang signifikan.

**Abdul Samad – Yayasan Palung**